



AGAMA DAN KEKUATAN : MEMAHAMI DINAMIKA POLITIK DALAM PRAKTIK KEAGAMAAN

RELIGION AND POWER: UNDERSTANDING POLITICAL DYNAMICS IN RELIGIOUS PRACTICE

**Akmir¹ Alvin kurniawan², Aldhy ruslansyah³, Indah saputri⁴, Miftahul Rizkiah⁵,
Muh.Rifkal⁶**

Universitas Sains Islam Alkawaddah Warramah Kolaka, Indonesia

Email: alfinklk23@gmail.com

Article history :

Received : 14-01-2025

Revised : 15-01-2025

Accepted: 17-01-2025

Published: 19-01-2025

Abstract

This research explores the dynamics of the relationship between religion and political power in various social and political contexts. Through a qualitative approach involving literature review and case studies in several countries, the study highlights how religion can serve as a tool for legitimizing power as well as an instrument of resistance against perceived illegitimate power. Case studies in Iran, Poland, and the United States demonstrate that religion is often used to legitimize political authority, while in certain situations, it becomes a tool for mobilization against authoritarian regimes. The research also reveals that despite formal separation between religion and the state in secular countries, religion continues to have a significant influence on politics, particularly in shaping public opinion and social policies. Additionally, globalization plays a role in reinforcing religious identity while simultaneously fueling political radicalization, especially in countries that feel threatened by Western cultural dominance. Social media has also become an important instrument in mediating the relationship between religion and politics, mobilizing support, and spreading religious messages related to politics. In conclusion, religion plays a complex and significant role in contemporary politics, both as a source of legitimacy and as a tool of resistance, influenced by globalization and modern media developments.

keywords :Religion, Political Power, Legitimacy.

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi dinamika hubungan antara agama dan kekuasaan politik dalam berbagai konteks sosial dan politik. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi pustaka dan studi kasus di beberapa negara, penelitian ini menyoroti bagaimana agama dapat berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan serta sebagai instrumen perlawanan terhadap kekuasaan yang dianggap tidak sah. Studi kasus di Iran, Polandia, dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa agama sering kali digunakan untuk melegitimasi kekuasaan politik, sementara dalam situasi tertentu, agama menjadi alat mobilisasi untuk melawan rezim otoriter. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa meskipun ada pemisahan formal antara agama dan negara di negara-negara sekuler, agama tetap memiliki pengaruh yang signifikan dalam politik, khususnya dalam pembentukan opini publik dan kebijakan sosial. Selain itu, globalisasi berperan dalam memperkuat identitas agama sekaligus memicu radikalisme dalam politik, terutama di negara-negara yang merasa terancam oleh dominasi budaya Barat. Media sosial juga menjadi instrumen penting dalam memediasi hubungan antara agama dan politik, memobilisasi dukungan, dan menyebarkan pesan-pesan agama yang berkaitan dengan politik. Kesimpulannya, agama memiliki peran yang kompleks dan signifikan dalam politik kontemporer, baik sebagai sumber legitimasi maupun sebagai alat perlawanan, yang dipengaruhi oleh globalisasi dan perkembangan media modern.

Kata kunci: agama, kekuasaan politik, legitimasi



PENDAHULUAN

Agama dan kekuatan politik telah menjadi dua elemen yang kerap berinteraksi dalam sejarah peradaban manusia. Dalam berbagai masyarakat, agama tidak hanya berfungsi sebagai sarana spiritual, tetapi juga seringkali menjadi instrumen kekuasaan. Agama memberikan legitimasi moral terhadap otoritas politik, dan sebaliknya, kekuatan politik dapat mempengaruhi interpretasi agama untuk tujuan kekuasaan. Pemahaman terhadap dinamika hubungan antara agama dan kekuatan ini penting dalam analisis politik kontemporer, terutama dalam konteks negara-negara yang menghadapi ketegangan antara agama dan pemerintahan sekuler.

Kekuatan politik seringkali menggunakan agama sebagai alat untuk memperkuat dominasi mereka. Dalam konteks ini, agama tidak hanya dipandang sebagai ajaran moral atau spiritual, tetapi juga sebagai instrumen politik yang bisa dimanipulasi untuk mengontrol massa. Dalam beberapa kasus, agama dijadikan sebagai pembenaran untuk mempertahankan kekuasaan, baik oleh penguasa maupun oposisi. Sebagai contoh, di banyak negara Timur Tengah, agama telah menjadi faktor utama dalam menentukan kebijakan negara, seperti yang terlihat dalam kebangkitan politik Islam pada abad ke-20 (Vali Nasr, 2006).

Agama dan kekuatan politik sering terjalin dalam bentuk institusi-institusi negara yang mengatur kehidupan beragama. Misalnya, di banyak negara, negara memiliki kontrol terhadap institusi-institusi keagamaan, mulai dari pendidikan agama hingga pengaturan ritual keagamaan. Dalam sistem seperti ini, agama tidak lagi murni menjadi urusan spiritual pribadi, tetapi juga menjadi bagian dari mekanisme kontrol negara. Hal ini dapat terlihat dalam hubungan antara negara dan gereja di Eropa pada masa lalu, di mana institusi gereja sering berkolaborasi dengan penguasa politik untuk menjaga kestabilan sosial dan politik (Charles Tilly, 1992).

Namun, hubungan antara agama dan politik tidak selalu harmonis. Ketegangan antara keduanya juga sering muncul, terutama ketika kelompok agama menentang kebijakan negara yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama mereka. Konflik antara agama dan kekuasaan politik ini bisa bersifat ideologis, seperti dalam kasus revolusi Iran 1979, di mana kekuatan politik yang berbasis agama menggulingkan rezim sekuler yang berkuasa. Dalam konteks ini, agama menjadi sarana perlawanan terhadap kekuasaan politik yang dianggap tidak adil.

Di sisi lain, agama juga bisa menjadi kekuatan pemersatu dalam politik. Dalam banyak masyarakat tradisional, agama memberikan identitas kolektif yang kuat dan menjadi dasar legitimasi politik. Identitas agama yang kuat sering kali dimanfaatkan oleh penguasa politik untuk membangun solidaritas sosial dan menggalang dukungan massa. Contoh klasik dari fenomena ini dapat dilihat dalam sejarah Eropa abad pertengahan, di mana monarki sering mengklaim mandat ilahi untuk melegitimasi kekuasaan mereka.

Keterlibatan agama dalam politik tidak hanya terbatas pada negara-negara yang mayoritas penduduknya religius. Di negara-negara sekuler, agama juga memainkan peran penting dalam politik, meskipun mungkin dalam bentuk yang lebih tersembunyi. Misalnya, dalam politik Amerika Serikat, agama sering menjadi faktor penting dalam pemilu, di mana kandidat politik memanfaatkan simbol-simbol agama untuk menarik pemilih yang religius. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Amerika Serikat secara resmi adalah negara sekuler, agama masih memiliki pengaruh signifikan dalam kehidupan politik (Robert D. Putnam, 2010).



Selain itu, agama juga sering kali menjadi alat mobilisasi politik dalam konteks konflik. Dalam situasi di mana masyarakat terpecah secara etnis atau ideologis, agama dapat menjadi bendera yang digunakan untuk menggalang dukungan atau bahkan memulai konflik. Konflik di Balkan pada tahun 1990-an, misalnya, melibatkan unsur-unsur agama sebagai salah satu faktor yang memperdalam perpecahan etnis dan nasionalisme.

Namun demikian, tidak semua interaksi antara agama dan politik bersifat negatif. Dalam banyak kasus, agama juga bisa menjadi kekuatan untuk perubahan sosial dan politik yang positif. Sejarah mencatat bagaimana gerakan-gerakan keagamaan telah berperan penting dalam mempromosikan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan perdamaian. Salah satu contoh yang paling menonjol adalah peran Gereja Katolik dalam mendukung gerakan Solidaritas di Polandia pada tahun 1980-an, yang akhirnya berkontribusi pada runtuhnya rezim komunis di negara tersebut (Timothy Garton Ash, 1983).

Interaksi antara agama dan kekuatan politik juga dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya di mana keduanya beroperasi. Di beberapa negara, agama dan kekuatan politik saling menguatkan karena adanya kesamaan ideologis, sementara di tempat lain, keduanya mungkin berada dalam ketegangan karena perbedaan pandangan dunia. Oleh karena itu, dinamika hubungan antara agama dan kekuatan politik tidak bisa dipahami tanpa memperhitungkan faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi hubungan ini.

Selain itu, pengaruh globalisasi juga membawa dampak signifikan terhadap hubungan antara agama dan politik. Globalisasi telah memperluas interaksi antarnegara dan budaya, termasuk dalam bidang keagamaan dan politik. Dalam konteks global, agama sering kali menjadi simbol identitas yang digunakan untuk menegosiasikan kekuatan dalam hubungan internasional. Fenomena seperti radikalisme agama di era globalisasi menunjukkan bagaimana agama dapat digunakan untuk menentang dominasi kekuatan global yang dianggap merugikan.

Tantangan terbesar dalam memahami hubungan antara agama dan kekuatan politik adalah kompleksitas dan keragaman bentuk interaksi keduanya. Dalam beberapa kasus, agama mendukung kekuatan politik, sementara di kasus lain, agama justru menjadi kekuatan perlawanan terhadap kekuasaan. Pemahaman yang mendalam tentang dinamika ini membutuhkan analisis yang komprehensif dari berbagai aspek, termasuk sejarah, budaya, dan konteks politik yang spesifik (José Casanova, 1994).

Dengan demikian, penting bagi para akademisi dan peneliti untuk terus mempelajari hubungan antara agama dan kekuatan politik, terutama di era modern yang semakin kompleks. Pemahaman ini tidak hanya relevan bagi para ilmuwan politik, tetapi juga bagi pembuat kebijakan yang harus berhadapan dengan tantangan hubungan antara agama dan kekuasaan dalam masyarakat mereka.

Dalam artikel ini, penulis berusaha mengeksplorasi lebih jauh bagaimana agama dan kekuatan politik saling berinteraksi, dengan fokus pada berbagai studi kasus dari berbagai wilayah di dunia. Dengan menganalisis contoh-contoh konkret, artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang peran agama dalam politik kontemporer dan bagaimana agama dapat menjadi kekuatan yang mengubah lanskap politik.



METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **studi kasus** (case study) untuk menganalisis interaksi antara agama dan kekuatan politik dalam konteks yang spesifik. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mempelajari fenomena dalam kondisi yang nyata dan konteks yang kaya, serta memberikan ruang untuk pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai aspek hubungan antara agama dan kekuatan politik dalam praktik keagamaan di masyarakat tertentu. Studi kasus yang digunakan melibatkan beberapa negara di mana agama memainkan peran signifikan dalam politik, seperti Iran, Polandia, dan Amerika Serikat.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan **data sekunder** sebagai sumber utama informasi. Data sekunder ini mencakup literatur yang relevan, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, laporan organisasi, serta publikasi pemerintah terkait agama dan politik. Literatur yang digunakan mencakup studi-studi terdahulu yang membahas tentang hubungan antara agama dan politik, teori-teori mengenai kekuasaan, serta kajian terkait praktik keagamaan dalam konteks sosial-politik. Data ini akan membantu peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas mengenai pola interaksi antara agama dan kekuatan politik di berbagai negara.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah **studi pustaka** (library research). Dalam studi pustaka ini, peneliti mengumpulkan berbagai sumber dari literatur yang tersedia terkait dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut meliputi:

- a. Buku dan artikel akademis mengenai agama dan kekuasaan.
- b. Jurnal ilmiah yang membahas teori-teori politik dan agama.
- c. Laporan organisasi internasional yang relevan, seperti Human Rights Watch dan Pew Research Center, yang membahas tentang kebebasan beragama dan pengaruh agama dalam politik.
- d. Dokumen-dokumen resmi dan arsip sejarah yang mendokumentasikan hubungan agama dan negara di beberapa negara.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan **analisis tematik**. Analisis tematik adalah metode untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola (tema) dalam data. Dalam penelitian ini, analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam hubungan antara agama dan kekuatan politik. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

- a. **Koding awal:** Peneliti akan membaca semua data yang telah dikumpulkan dan memberikan koding untuk tema-tema yang muncul berulang kali, seperti "legitimasi kekuasaan melalui agama", "agama sebagai alat perlawanan", atau "pengaruh agama dalam kebijakan negara".



- b. **Identifikasi tema utama:** Setelah koding dilakukan, peneliti akan mengidentifikasi tema-tema utama yang relevan dengan tujuan penelitian.
- c. **Interpretasi data:** Peneliti akan menginterpretasikan tema-tema yang muncul dengan merujuk pada kerangka teori yang digunakan, yaitu teori-teori kekuasaan dan agama.

5. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah **hubungan antara agama dan kekuatan politik** di berbagai negara yang dipilih sebagai studi kasus. Negara-negara tersebut dipilih berdasarkan tingkat pengaruh agama dalam politik dan peran agama dalam membentuk kekuasaan atau kebijakan. Beberapa negara yang akan dijadikan fokus studi kasus meliputi:

- a. **Iran** sebagai contoh negara dengan politik teokratis yang kuat.
- b. **Polandia** sebagai contoh negara di mana Gereja Katolik berperan penting dalam perubahan politik (gerakan Solidaritas).
- c. **Amerika Serikat** sebagai negara sekuler dengan pengaruh agama yang signifikan dalam politik elektoral.

6. Validitas Data

Untuk memastikan **validitas data**, peneliti akan melakukan triangulasi data, yaitu membandingkan dan mengontraskan temuan dari berbagai sumber data yang berbeda. Triangulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa temuan penelitian benar-benar mencerminkan fenomena yang sedang diteliti dan bukan sekadar hasil interpretasi subjektif peneliti. Peneliti akan menggunakan sumber-sumber yang kredibel dan valid, seperti jurnal akademik yang telah melalui proses peer-review dan dokumen resmi dari lembaga-lembaga internasional atau pemerintah.

7. Kerangka Teoritis

Penelitian ini didasarkan pada dua teori utama:

- a. **Teori Kekuasaan Michel Foucault:** Teori ini digunakan untuk memahami bagaimana kekuasaan bekerja melalui mekanisme agama dan politik, serta bagaimana agama berfungsi sebagai salah satu bentuk kontrol sosial yang dapat memperkuat atau melawan kekuasaan politik. Foucault berpendapat bahwa kekuasaan tersebar dalam berbagai institusi sosial, termasuk agama, dan berfungsi tidak hanya melalui paksaan fisik, tetapi juga melalui pengendalian pikiran dan perilaku individu.
- b. **Teori Legitimasi Max Weber:** Weber menjelaskan bahwa agama dapat berfungsi sebagai sumber legitimasi bagi kekuasaan politik. Dalam banyak masyarakat, penguasa politik menggunakan agama untuk melegitimasi otoritas mereka, baik melalui klaim terhadap mandat ilahi atau dengan mendekati diri kepada simbol-simbol agama.

8. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, karena penelitian ini berbasis data sekunder, peneliti tidak dapat secara langsung memverifikasi data empiris yang digunakan. Kedua, pemilihan negara sebagai studi kasus terbatas pada negara-negara tertentu,



sehingga temuan penelitian mungkin tidak dapat digeneralisasi ke konteks global secara keseluruhan. Namun, peneliti berusaha untuk memilih negara-negara yang mewakili berbagai tipe interaksi antara agama dan kekuasaan politik agar hasil penelitian tetap relevan secara lebih luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara agama dan kekuatan politik dengan fokus pada bagaimana agama digunakan baik sebagai alat legitimasi kekuasaan maupun sebagai kekuatan perlawanan dalam berbagai konteks politik. Berdasarkan analisis terhadap literatur dan studi kasus dari beberapa negara, penelitian ini menemukan beberapa pola utama yang menunjukkan dinamika hubungan antara agama dan kekuatan politik. Berikut adalah hasil dan pembahasan dari penelitian ini yang dibagi menjadi beberapa tema utama:

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa agama sering kali digunakan sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan politik. Dalam konteks ini, penguasa politik memanfaatkan simbol-simbol agama dan ajaran keagamaan untuk memperkuat posisi mereka di mata masyarakat. Studi kasus Iran menunjukkan bagaimana pemerintahan pasca-Revolusi 1979 menjadikan Islam sebagai dasar utama legitimasi kekuasaan. Pemerintahan Ayatollah Khomeini menggunakan konsep *velayat-e faqih* (kepemimpinan ulama) untuk membenarkan otoritas politik yang dipimpin oleh kaum ulama, menciptakan sistem teokrasi di mana agama dan politik terjalin erat (Nikki R. Keddie, 2003).

Begitu pula dalam sejarah Eropa abad pertengahan, agama Kristen, khususnya Katolik, menjadi sumber legitimasi bagi kekuasaan monarki. Para raja sering kali mengklaim bahwa mereka memerintah berdasarkan mandat ilahi, yang dikenal sebagai *divine right of kings*. Ini memberi mereka otoritas moral dan spiritual yang memperkuat legitimasi politik mereka di mata rakyat dan mencegah pemberontakan (R.W. Southern, 1970).

Di Amerika Serikat, meskipun merupakan negara sekuler, simbol-simbol agama tetap digunakan dalam politik untuk membangun legitimasi moral. Kandidat politik sering menggunakan retorika agama dan menyebutkan keyakinan religius mereka untuk mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok agama, terutama di kalangan Kristen Evangelis yang memiliki pengaruh signifikan dalam politik elektoral Amerika. Ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal dipisahkan, agama tetap memainkan peran penting dalam menciptakan legitimasi politik di negara-negara modern (Robert D. Putnam, 2010).

Temuan lain yang penting adalah bahwa agama tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan politik, tetapi juga sering kali menjadi instrumen perlawanan terhadap kekuasaan yang dianggap tidak sah atau tidak adil. Salah satu contoh yang paling jelas adalah Revolusi Iran pada tahun 1979. Di bawah kepemimpinan Khomeini, gerakan Islamis Syiah berhasil menggulingkan rezim monarki Pahlavi yang dianggap korup dan pro-Barat. Gerakan ini menggunakan retorika keagamaan yang kuat untuk menggalang dukungan massa dan menentang rezim sekuler yang telah lama menekan kehidupan keagamaan di Iran. Ini menunjukkan bagaimana agama dapat menjadi kekuatan mobilisasi politik yang sangat efektif dalam konteks penindasan politik.

Hal serupa juga terjadi di Polandia pada 1980-an, di mana Gereja Katolik berperan penting dalam gerakan Solidaritas yang menentang rezim komunis. Gereja memberikan dukungan moral dan spiritual bagi para aktivis, sementara Paus Yohanes Paulus II, yang berasal dari Polandia,



memainkan peran penting dalam mendorong perubahan sosial-politik di negara tersebut. Solidaritas akhirnya berhasil menggulingkan rezim komunis dan membuka jalan bagi demokratisasi di Polandia, yang menunjukkan bahwa agama bisa menjadi kekuatan yang signifikan dalam perjuangan melawan kekuasaan otoriter.

Dalam konteks negara-negara sekuler, hubungan antara agama dan kekuasaan politik lebih rumit. Sementara prinsip-prinsip sekularisme menuntut pemisahan antara agama dan negara, kenyataannya agama tetap memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan politik. Di Amerika Serikat, misalnya, meskipun konstitusi menjamin pemisahan antara agama dan negara, agama terus menjadi faktor penting dalam politik elektoral. Kandidat-kandidat politik sering kali berusaha menarik suara kelompok-kelompok agama, terutama di wilayah-wilayah di mana pemilih religius memiliki pengaruh signifikan. Dalam hal ini, agama berfungsi bukan hanya sebagai kekuatan moral, tetapi juga sebagai modal politik yang bisa dieksploitasi untuk mencapai kekuasaan.

Namun, negara-negara sekuler sering kali juga menghadapi ketegangan ketika kebijakan publik bertentangan dengan keyakinan agama tertentu. Di Amerika Serikat, isu-isu seperti aborsi, pernikahan sesama jenis, dan kebebasan beragama telah memicu perdebatan yang intens antara kelompok agama dan pemerintah, menunjukkan bahwa hubungan antara agama dan kekuasaan politik dalam konteks sekuler tetap dinamis dan penuh tantangan.

Globalisasi telah mempercepat pertukaran ide, termasuk ide-ide keagamaan, di seluruh dunia. Penelitian ini menemukan bahwa globalisasi sering kali memperkuat identitas agama di banyak negara, terutama di kalangan kelompok-kelompok yang merasa terancam oleh dominasi budaya Barat. Radikalisasi agama menjadi salah satu respons terhadap kekuatan globalisasi ini, terutama di negara-negara Muslim. Fenomena seperti kebangkitan kelompok-kelompok Islam radikal di Timur Tengah dan Asia Selatan menunjukkan bagaimana agama digunakan sebagai alat untuk menentang kekuatan politik dan ekonomi global yang dianggap merusak nilai-nilai tradisional dan agama.

Di sisi lain, globalisasi juga memperkuat interaksi antara agama-agama di tingkat global, yang kadang-kadang menghasilkan konflik politik. Konflik ini sering terjadi ketika agama digunakan sebagai simbol identitas dalam politik internasional. Misalnya, konflik antara kelompok Islamis radikal dengan pemerintah Barat sering kali didasari pada perbedaan ideologis yang berakar pada keyakinan agama. Hal ini menunjukkan bahwa agama masih menjadi salah satu kekuatan politik yang paling kuat di era globalisasi.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran agama dalam politik mengalami pergeseran di era modern. Di banyak negara, agama tidak lagi menjadi satu-satunya sumber legitimasi politik seperti yang terjadi di masa lalu, tetapi tetap memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi kebijakan politik. Di negara-negara demokratis, agama sering digunakan untuk membingkai isu-isu sosial dan kebijakan publik. Di negara-negara dengan mayoritas penduduk beragama, agama masih berperan besar dalam mempengaruhi keputusan politik, meskipun kekuasaan politik secara formal mungkin tidak terhubung langsung dengan institusi keagamaan.

Dalam era digital, media memainkan peran penting dalam memediasi hubungan antara agama dan politik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa media sering kali berperan dalam memperkuat pesan-pesan agama yang berkaitan dengan politik. Di banyak negara, media sosial digunakan oleh kelompok-kelompok agama dan politik untuk memobilisasi dukungan,



menyebarkan informasi, dan mengkritik kebijakan pemerintah. Media juga dapat memperkuat stereotip atau prasangka tertentu terhadap kelompok agama, yang dapat memicu ketegangan politik. Oleh karena itu, media modern menjadi instrumen yang signifikan dalam membentuk opini publik terkait hubungan agama dan kekuasaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa hubungan antara agama dan kekuasaan politik sangat kompleks dan dinamis, berperan dalam berbagai cara tergantung pada konteks sosial, politik, dan budaya di setiap negara. Beberapa temuan utama yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Agama sebagai Legitimasi Kekuasaan:** Agama sering digunakan oleh penguasa politik untuk memperkuat legitimasi kekuasaan mereka. Dalam sistem teokrasi, seperti di Iran, agama menjadi basis legitimasi langsung bagi kekuasaan politik, sementara di negara-negara sekuler seperti Amerika Serikat, simbol dan retorika agama tetap menjadi alat penting dalam membangun legitimasi moral di mata pemilih.
2. **Agama sebagai Alat Perlawanan:** Selain sebagai sumber legitimasi, agama juga sering digunakan sebagai instrumen perlawanan terhadap kekuasaan yang dianggap tidak sah atau menindas. Contoh-contoh seperti Revolusi Iran dan gerakan Solidaritas di Polandia menunjukkan bagaimana agama dapat menjadi kekuatan mobilisasi politik yang efektif dalam melawan rezim otoriter.
3. **Pengaruh Agama dalam Sistem Sekuler:** Meskipun banyak negara modern mengadopsi prinsip sekularisme, agama tetap memiliki peran signifikan dalam politik, terutama melalui pengaruh terhadap opini publik dan isu-isu kebijakan sosial. Negara-negara seperti Amerika Serikat menunjukkan bahwa meskipun ada pemisahan formal antara agama dan negara, agama tetap memengaruhi proses politik.
4. **Radikalisasi dan Globalisasi:** Globalisasi mempercepat pertukaran ide agama di seluruh dunia, yang dapat memperkuat identitas agama sekaligus memicu radikalisasi. Di beberapa negara Muslim, agama menjadi alat untuk menentang kekuatan politik dan ekonomi global, khususnya yang dianggap mengancam nilai-nilai agama tradisional.
5. **Media sebagai Mediator:** Peran media, terutama media sosial, sangat penting dalam memediasi hubungan antara agama dan politik. Media dapat memobilisasi dukungan, menyebarkan informasi, dan memperkuat narasi agama dalam konteks politik modern, serta dapat mempengaruhi opini publik terhadap hubungan antara agama dan kekuasaan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa agama masih memainkan peran penting dalam politik kontemporer, baik sebagai alat legitimasi maupun perlawanan. Dinamika ini dipengaruhi oleh konteks globalisasi dan peran media modern, yang memperkuat hubungan antara agama dan kekuasaan politik di berbagai negara. Dengan demikian, memahami peran agama dalam politik membutuhkan pendekatan yang mendalam dan kontekstual, mengingat keragaman pengalaman agama-politik di seluruh dunia.



DAFTAR PUSTAKA

- Ash, T. G. (1983). *The Polish Revolution: Solidarity*. New Haven: Yale University Press.
- Casanova, J. (1994). *Public Religions in the Modern World*. Chicago: University of Chicago Press.
- Keddie, N. R. (2003). *Modern Iran: Roots and Results of Revolution*. New Haven: Yale University Press.
- Nasr, V. (2006). *The Shia Revival: How Conflicts within Islam Will Shape the Future*. New York: W.W. Norton.
- Putnam, R. D. (2010). *American Grace: How Religion Divides and Unites Us*. New York: Simon & Schuster.
- Southern, R. W. (1970). *Western Society and the Church in the Middle Ages*. Harmondsworth: Penguin.
- Tilly, C. (1992). *Coercion, Capital, and European States, AD 990–1990*. Cambridge: Blackwell.